



Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Sebelum Dan Selama Covid-19

Riszki*

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Yudi

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Ratih Kusumastuti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM 15, Mendalo Indah, Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: riszkiakuntan@gmail.com

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

Abstract. *This research aims to see how the performance of Sarolangun Regency was carried out during the emergence of the Covid 19 pandemic. This research belongs to a quantitative descriptive type with a comparative concept with the Paired Sample T-Test on APBD with analysis of the ratio of fiscal decentralization, regional financial independence, and the effectiveness and efficiency of PAD. In the analysis used, it shows the results of a very poor ability to implement decentralization, lack of independence in carrying out financial performance which is still in an instructive relationship pattern, and the effectiveness of PAD which is ineffective because it fluctuates and tends to decrease, and the efficiency of PAD which included in the criteria of inefficiency. The conclusions that can be drawn from the results of testing the variables do not show any significant differences in fiscal decentralization, regional financial independence, and PAD efficiency, except for the PAD effectiveness variable has significant differences. However, overall the financial performance of Sarolangun Regency did not experience any difference either before or during the Covid-19 outbreak.*

Keywords: *Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency of PAD*

Abstrak. Penelitian memiliki tujuan melihat bagaimana kinerja yang telah dilakukan Kabupaten Sarolangun saat munculnya wabah pandemi Covid-19. Penelitian termasuk kedalam jenis deskriptif kuantitatif yang berkonsep komparatif dengan uji *Paired Sample T-Test* terhadap APBD dengan analisis rasio desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi PAD. Dalam analisis yang digunakan memperlihatkan hasil kemampuan yang sangat kurang dalam melaksanakan desentralisasi, ketidakmandirian dalam melaksanakan kinerja keuangan yang masih berada pada pola hubungan intruktif, serta efektivitas PAD yang tidak efektif karena mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, dan efisiensi PAD yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap hasil pengujian variabel tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, serta efisiensi PAD, kecuali variabel efektivitas PAD yang terdapat perbedaan secara signifikan. Namun secara keseluruhan kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun tidak mengalami perbedaan baik sebelum maupun saat Covid-19 mewabah.

Kata kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi PAD*

PENDAHULUAN

Munculnya wabah virus SARS-Cov 2 yang menyerang pada sistem pernapasan atau yang dikenal familiar dengan nama *Covid-19* telah menyebabkan banyak kasus kematian diseluruh dunia. Infeksi ini sebelumnya muncul dan mewabah di kota Wuhan, provinsi Hubei, China, pada akhir Desember 2019. Proses penyebaran virus yang sangat cepat melalui interaksi langsung dengan proses penularan virus melalui percikan cairan di udara yang bersumber dari mulut dan hidung pada saat berbicara maupaun bersin, mengakibatkan Organisasi Kesehatan Dunia memutuskan status virus ini sebagai penyakit pandemi global, karena hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat dengan perkiraan waktu beberapa bulan saja sejak infeksi pertama ditemukan virus ini mampu menyebar keseluruh dunia. Wabah penyakit ini tidak hanya menyebabkan dampak pada dimensi kesehatan tetapi juga menimbulkan dampak masalah yang sangat serius di dunia pada semua sektor.

Kasus penyakit *Covid-19* pertama kali ditemukan di Indonesia tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 di pulau Jawa lebih tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Tidak butuh waktu yang lama untuk virus ini menyebar, tercatat pada tanggal 25 November 2021 sejak kasus pertama ditemukan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* mempublikasikan data yang berisi kasus positif *Covid-19* mencapai 4.254.815 dengan angka dinyatakan sembuh sebanyak 4.102.993 serta 143.782 dinyatakan meninggal dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Virus Corona tidak hanya dirasakan di bidang kesehatan namun juga berdampak di bidang perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hadirnya pelaksanaan *Social Distancing* (menjaga jarak), PSBB, dan PPKM telah mematikan berbagai kegiatan ekonomi. Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ekonomi masyarakat yang terkena dampak adalah dengan memberikan Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Terhadap Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Akibat Dampak Virus Covid-19 (<https://kemlu.go.id>).

Efek wabah *Covid-19* tidak hanya semata-mata terjadi pada bidang kesehatan dan kemanusiaan tetapi juga terjadi pada aktivitas perekonomian tingkat daerah, termasuk daerah-daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam lingkup wilayah provinsi Jambi. Dampak wabah *Covid-19* terhadap perekonomian dapat di ketahui dengan fenomena persentase kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021 (dalam Miliar)

No	Kabupaten/Kota	Anggaran/Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Tanjung Jabung Timur	53,90	81,60	151,39
2	Bungo	145,14	198,75	136,94
3	Sungai Penuh	46,24	59,11	127,85
4	Tebo	77,13	92,92	120,47
5	Muaro Jambi	102,26	110,75	108,30
6	Batanghari	138,01	148,44	107,56
7	Merangin	108,34	107,88	99,58
8	Tanjung Jabung Barat	120,00	118,53	98,77
9	Kota Jambi	419,56	384,73	91,70
10	Kerinci	85,91	66,89	77,87
11	Sarolangun	106,39	63,59	59,77

Sumber: data yang diolah

Pada masa otonomi, Pemerintah diharapkan lebih leluasa dalam menangani persoalan pemerintahannya. Hal ini searah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang memberitahukan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam menata dan mengurus perkara serta persoalan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat secara mandiri sesuai dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acuan hukum menjadi landasan otonomi daerah itu sendiri, karena implementasi globalisasi menuntut perluasan kewenangan dan tanggung jawab nyata untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengevaluasi potensi sumber daya daerah.

Karena kebijakan otonomi daerah, suatu pemerintah daerah diperbolehkan secara leluasa mengelola serta memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pusat dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlunya dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan dengan tujuan melihat, menilai, serta mengevaluasi kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk cerminan dari indikator otonomi daerah yang dicapai. Menurut Antari & Sedana (2018), evaluasi kinerja sangat penting dilaksanakan karena disebabkan kinerja menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah serta menunjukkan harapan pemerintah pusat agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya sehingga memungkinkan pembangunan daerah yang pesat tanpa perlu menunggu pendanaan pusat.

Dampak *Covid-19* terhadap Kabupaten Sarolangun dibenarkan oleh Kepala BPKAD

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total PAD
2017	13,53	2,09	6,19	63,83	85,19
2018	54,59	2,18	7,88	54,18	118,83
2019	17,36	2,91	8,30	66,05	94,62
2020	16,07	1,67	8,00	44,36	70,10
2021	18,94	2,73	8,03	34,24	63,59
2022	20,89	3,18	8,77	24,43	57,28

Sarolangun Emilia Sari yang mengatakan bahwa dampak *Covid-19* menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus. Plt Bupati H. Hilalatil Badri juga mengakui bahwa *Covid-19* menyebabkan dampak terhadap pendapatan daerah serta penerimaan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat (www.radarjambi.co.id). Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang sebagian besar bersumber pada dana tersebut yang di perkuat dengan pernyataan “Dalam menyusun pagu anggaran dan plapon untuk OPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah” kata Emilia Sari. Tim TAPD Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan pembangunan prioritas pada tahun 2021 dengan prinsip efisiensi dan efektivitas (www.sarolangunkab.go.id).

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (dalam Miliar)

Sumber: Data diolah

Fenomena yang telah di paparkan menunjukkan bahwa *Covid-19* secara nyata dan data berdampak terhadap aktivitas ekonomi, serta penurunan PAD akibat *Covid-19* berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun *Covid-19* mempengaruhi aktivitas ekonomi dan penurunan PAD, tetap menuntut Pemerintah daerah menggali sumber potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi penerimaan PAD. Karena biaya penyelenggaraan pembangunan bersumber pada PAD sebagai bentuk kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah (Ishak, 2021). Dalam melihat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat di lihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan sebuah ukuran penilaian kemampuan mengelola bidang keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah bidang yang mengkaji data pembukuan yang diberikan oleh otoritas publik dan organisasi yang penting bagi suatu administrasi (Halim, 2007). Akuntansi keuangan sektor publik diharapkan dapat menyampaikan laporan keuangan publik yang digunakan sebagai dinamika keuangan, sosial, dan politik dalam pengaturan keuangan pemerintah.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan data akuntansi pemerintah yang menyediakan informasi transaksi ekonomi serta keuangan pemerintah yang ditunjukkan pada bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan (Erlina et al., 2015). Akuntansi pemerintahan terbagi menjadi akuntansi keuangan daerah dan akuntansi pemerintah pusat yang merupakan dua subbidang dari akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan daerah diperlukan dalam rangka menjalankan otonomi daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah tentunya berbeda dengan laporan keuangan sektor privat (swasta). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah meliputi:

- a. Laporan Realisasi APBD;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbeda dengan laporan keuangan sektor privat (swasta) yang digunakan oleh para investor dalam urusan bisnis. Halim (2007) mengatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah ditunjukkan untuk masyarakat yang diantaranya:

- a. DPR/DPRD;
- b. Masyarakat pengguna jasa publik;
- c. Investor dan kreditor pemerintah;
- d. Lembaga Negara;
- e. Kelompok politik; dan

f. Pegawai pemerintah.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Sesuai dengan PP No.03 Tahun 2007, bentuk kewajiban yang perlu disampaikan terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mahmudi (2019) mengatakan laporan terpenting yang dibutuhkan pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat adalah laporan keterangan pertanggungjawaban atau disingkat dengan LKPJ, laporan ini penting karena terdiri dari laporan pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta pembangunan dan laporan pelaksanaan APBD yang mengandung data keuangan yang menjadi objek dalam melakukan analisis.

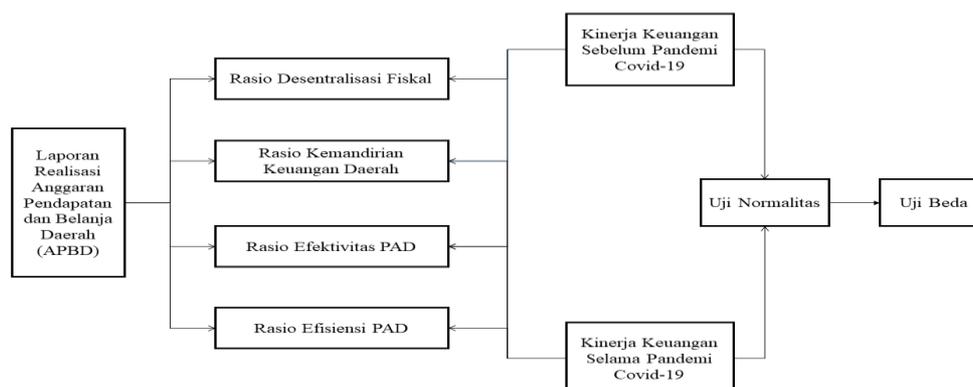
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Rudianto (2009) mengatakan bahwa rencana kerja masa depan organisasi yang formal, kuantitatif, serta sistematis yang terwujud dalam anggaran. Proses perencanaan anggaran disebut dengan penganggaran yang ditulis dalam bentuk sederet angka target pencapaian (realisasi). APBD merupakan rencana keuangan yang disusun dalam periode tahunan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.07/2020. Ada tiga bagian APBD: Pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah, lalu Pendapatan transfer terdiri dari transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan transfer yang dilakukan antar daerah. Kemudian pendapatan daerah lain yang sah termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer merupakan Belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari perkiraan rencana belanja yang berlebihan (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pembiayaan cicilan pokok kewajiban.

Kinerja Keuangan Daerah

Pelaksanaan keuangan daerah merupakan alat untuk menilai kemampuan pengelolaan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran dalam melaksanakan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan pemerintah dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku. Tingkat pencapaian sebuah hasil kerja pada sektor keuangan daerah, yang memiliki komposisi pendapatan serta belanja daerah dengan pemakaian pola keuangan yang ditentukan berdasarkan kebijakan atau peraturan undang-undang dalam suatu periode anggaran merupakan pengertian kinerja keuangan pemerintahan daerah. (Mahmudi, 2019) mengatakan bahwa analisis rasio keuangan terhadap APBD dapat dipakai dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah, seperti: desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti

Penelitian ini menggunakan empat variabel pengukuran yaitu: Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, serta Efektivitas dan Efisiensi PAD, sedangkan untuk variabel pengukuran Ketergantungan Keuangan Daerah tidak di gunakan karena apabila suatu kinerja keuangan berada dalam keadaan mandiri maka tidak akan menciptakan ketergantungan dan sebaliknya serta pemilihan variabel Kemandirian Keuangan Daerah dinilai lebih tepat karena sejalan dengan cita-cita otonomi daerah. Hubungan antar masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian digambarkan dan di interpretasikan pada gambar kerangka pemikiran Gambar 1.

Hipotesis

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan serta fenomena yang terjadi, sehingga jawaban sementara yang dapat diajukan, yaitu:

H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio desentralisasi fiskal sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

H2: Terdapat perbedaan Kinerja Keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

H3: Terdapat perbedaan Kinerja Keuangan berdasarkan rasio efektivitas PAD sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

H4: Terdapat perbedaan Kinerja Keuangan berdasarkan rasio Efisiensi PAD sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

H5: Terdapat perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan dengan tujuan menggambarkan karakteristik yang dimiliki suatu populasi atau sebuah fenomena yang berguna untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana, serta bagaimana (Wibisono, 2000). Kuantitatif merupakan sebuah informasi berupa angka-angka yang di analisis dengan memanfaatkan statistik (Sugiyono, 2019). Deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berencana untuk menggambarkan realitas dan kualitas populasi secara efisien, murni, dan tepat atau upaya untuk menggambarkan suatu kekhasan secara mendalam (Yusuf, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data berupa kuantitatif. Menurut (Amir et al., 2009) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan informasi yang pengukurannya menggunakan skala numerik atau dengan kata lain angka. Metode dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan data. Artinya mengumpulkan dan mencari data dengan menggunakan hal-hal seperti buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, agenda, foto, dan sebagainya. Informasi yang dihimpun dan ditangani berasal dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia lebih tepatnya pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat situs [www.djpk.kemenkeu.go .id/masuk/informasi/apbd](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/masuk/informasi/apbd).

Sumber data penelitian ini berasal dari informasi pihak ketiga atau disebut data sekunder. Menurut (Sujarweni, 2020) data sekunder merupakan informasi yang berasal dari laporan keuangan maupun laporan lainnya yang didistribusikan organisasi dalam bentuk buku, catatan, surat kabar atau majalah, artikel atau jurnal, dan lain-lain. Data dalam penelitian ini bersumber dari informasi publikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Populasi dan Sampel

Menurut (Sujarweni, 2020) populasi adalah setiap dan semua objek maupun subjek yang memenuhi seperangkat ciri khusus yang unik serta ditetapkan para peneliti selama periode riset berlangsung dan menarik kesimpulan. Populasi suatu objek adalah area atau ruang lingkup yang diamati. (Sugiyono, 2019) mengatakan populasi adalah kategori luas yang meliputi: objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan atribut yang akan dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun merupakan populasi dalam penelitian. Sugiyono (2019) mengatakan sampel merupakan bagian populasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 menjadi sampel yang digunakan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria khusus (Sujarweni, 2020).

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang berpengaruh terhadap muncul atau berubahnya variabel dependen. Desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, serta efisiensi PAD merupakan variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini. Variabel dependen disinggung sebagai variabel terikat. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa variabel dependen merupakan variabel disebabkan atau dampak dari faktor bebas (variabel independen). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk analisis penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) statistik deskriptif adalah seperangkat alat analisis yang dipakai untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan data yang dikumpulkan sesuai apa adanya serta tidak bermaksud

menarik kesimpulan secara umum atau bersifat generalisasi. Rasio keuangan terhadap APBD menjadi bagian analisis yang dapat dilakukan.

A. Desentralisasi Fiskal

$$Desentralisasi\ Fiskal = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Indikator penilaian dalam melihat tingkat desentralisasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Indikator Penilaian Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2010) dalam Kusmila et al.,(2018)

B. Kemandirian Keuangan Daerah

$$Rasio\ Kem.\ K.\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{T.\ Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Indikator penilaian dalam mengenali pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Indikator Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Dwiranda (2007) dalam Manueke (2020)

C. Efektivitas PAD

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Indikator penilaian dalam melihat tingkat efektivitas PAD ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Indikator Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja (%)	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

D. Efisiensi PAD

$$Rasio\ Efisiensi\ PAD = \frac{Biaya\ Pemerolehan\ PAD}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Indikator penilaian dalam melihat tingkat efisiensi PAD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Indikator Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja (%)	Kriteria
<10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

E. Uji Beda

Uji Normalitas

Data rasio akan diuji dengan statistik parametris. Pengujian ini penting dilakukan sebelum melakukan uji beda, karena alat uji ini diperlukan dalam mengetahui apakah sebuah data mempunyai sebaran yang normal atau sebaliknya tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan jenis *Shapiro Wilk*, pemilihan uji statistik ini karena lebih cocok digunakan untuk sampel kecil atau kurang dari 30 dan uji menggunakan data dengan skala rasio dan interval (Widyaningsih, 2021).

Uji Beda (*Paired Sample T-Test*)

Temuan pengujian normalitas dipakai untuk memilih alat uji yang paling tepat untuk digunakan dalam proses pengujian selanjutnya. Uji non parametrik *Wilcoxon* digunakan jika data tidak berdistribusi normal, sedangkan uji *t-paired* digunakan jika data berdistribusi normal.

Perangkat lunak SPSS digunakan untuk membandingkan sampel berpasangan menggunakan pemrosesan data. Menurut Santoso dalam Mengkuningtyas & Adib (2015), sampel berpasangan (paired sample) merupakan sampel yang berasal dari satu subjek tetapi diperlakukan dan diukur dengan cara yang tidak sama. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel yang akan diuji adalah sampel rasio kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebelum (2017–2019) dan selama wabah Covid-19 berlangsung (2020–2022). Jika hasil pengolahan dan dengan menggunakan uji data, tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05., bisa di artikan bahwa secara signifikan tidak memiliki perbedaan, sedangkan apabila nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam data tersebut.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sarolangun terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999. Kondisi geografis berada pada $01^{\circ} 53'39''$ s/d $02^{\circ} 46'24''$ LS serta berada di $102^{\circ} 03'39''$ - $103^{\circ} 13'17''$ BT. Kabupaten Batanghari adalah perbatasan di utara, Kabupaten Musi Rawas di timur, Kabupaten Rejang Lebong di selatan, dan Kabupaten Merangin di barat..

Kabupaten Sarolangun memiliki luas wilayah sebesar 6.174 Km² serta memiliki 10 Kecamatan, 149 Desa, serta 9 Kelurahan. Dengan rincian:

1. Kecamatan Batang Asai seluas 858 Km² yang terdiri dari 23 Desa definitif dengan persentase luas 13,90% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
2. Kecamatan Limun seluas 799 Km² yang terdiri dari 16 Desa definitif dengan persentase luas 12,94% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
3. Kecamatan Cermin Nan Gedang seluas 320 Km² yang terdiri dari 10 Desa definitive dengan persentase luas 5,18% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
4. Kecamatan Pelawan seluas 330 Km² yang terdiri dari 14 Desa definitif dengan persentase luas 5,34% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
5. Kecamatan Singkut seluas 173 Km² yang terdiri dari 12 Desa definitive dan 1 kelurahan dimana Desa Bukit Tigo berstatus desa perkotaan dengan persentase luas 2,80% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
6. Kecamatan Sarolangun seluas 319 Km² yang terdiri dari 12 Desa definitive dan 6 Kelurahan dimana 5 desa/kelurahan berstatus perkotaan dengan persentase luas 5,17% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.

7. Kecamatan Batin VIII seluas 498 Km² yang terdiri 14 Desa definitive dan 1 Kelurahan dengan persentase luas 8,07% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
8. Kecamatan Pauh seluas 1.770 Km² yang terdiri 13 Desa definitf dan 1 Kelurahan dengan persentase luas 28,67% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
9. Kecamatan Air Hitam seluas 471 Km² yang terdiri 9 Desa definitive dengan persentase luas 7,63% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.
10. Kecamatan Mandiangin seluas 636 Km² yang terdiri 28 Desa definitf dengan persentase luas 10,30% dari luas total wilayah Kabupaten Sarolangun.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Perhitungan rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Sarolangun disajikan pada tabel bawah ini:

Tabel 7. Rasio Desentralisasi Kabupaten Sarolangun Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio	Kriteria
2017	1.162,32	85,19	0,07	Sangat Kurang
2018	1.226,39	118,83	0,10	Sangat Kurang
2019	1.324,27	94,62	0,07	Sangat Kurang
2020	1.155,46	70,10	0,06	Sangat Kurang
2020	1.143,75	63,59	0,06	Sangat Kurang
2020	1.151,33	59,28	0,05	Sangat Kurang
Rata-rata	1.193,92	81,94	0,07	Sangat Kurang

Sumber: data diolah

Hasil pengolahan data kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun berdasarkan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kinerja keuangan selama enam tahun (2017-2022) rata-rata berada pada angka rasio 0,07 yang berarti kinerja keuangan masih pada kategori sangat kurang. Maka kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun belum memiliki kemampuan menyelenggarakan desentralisasi dengan baik. Mahmudi, (2019) mengatakan bahwa kemampuan untuk melaksanakan desentralisasi meningkat dengan tingkat kontribusi PAD,

maka dari itu Kabupaten Sarolangun belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik dikarenakan belum optimal dan memaksimalkan kinerja dalam mengeksplorasi potensi sumber daya yang mampu mengongkrak pendapatan yang dapat di manfaatkan sehingga penerimaan PAD dalam pendapatan daerah masih menunjukkan angka yang rendah.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan hasil seperti di bawah ini:

Tabel 8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	T.Pusat+Provinsi+Pinjaman	Rasio	Kemampuan	Pola Hubungan
2017	85,19	1.096,48	0,08	Rendah Sekali	Instruktif
2018	118,83	1.067,46	0,11	Rendah Sekali	Instruktif
2019	94,62	1.186,41	0,08	Rendah Sekali	Instruktif
2020	70,1	1.035,58	0,07	Rendah Sekali	Instruktif
2021	63,59	1.032,23	0,06	Rendah Sekali	Instruktif
2022	59,28	1.089,59	0,05	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	81,94	1.084,63	0,08	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan bahwa kinerja sisi keuangan selama enam tahun (2017-2022) rata-rata berada pada angka rasio 0,08 yang berarti kinerja keuangan masih pada kategori sangat rendah untuk pola hubungan yang bersifat instruktif.. Maka kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun belum mampu mengelola keuangan daerahnya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Mahmudi, (2019) mengatakan bahwa semakin tinggi proporsinya, semakin mandiri dan sebaliknya, semakin rendah proporsinya, semakin tidak mandiri. Ketidakmandirian Kabupaten ini dikarenakan Kabupaten Sarolangun masih bergantung terhadap pendapatan dana transfer sehingga belum dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan tanpa bantuan dana dari pusat, daerah, dan pinjaman.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dihitung tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Kriteria
2017	85,19	75,47	1,13	Sangat Efektif
2018	118,83	99,78	1,19	Sangat Efektif
2019	94,62	121,16	0,78	Kurang Efektif
2020	70,1	95,43	0,73	Tidak Efektif
2021	63,59	106,39	0,60	Tidak Efektif
2022	59,28	93,15	0,64	Tidak Efektif
Rata-rata	81,94	98,56	0,84	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun berdasarkan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan selama enam tahun (2017-2022) rata-rata berada pada angka rasio 0,84 yang berarti kinerja keuangan masih berada pada kategori kurang efektif. Mahmudi, (2019) menerangkan bahwa rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai terhadap target penerimaan PAD yang telah ditentukan. Efektivitas PAD Kabupaten Sarolangun sebelum pandemi *Covid-19* dapat di katakan sangat efektif karena berhasil merealisasikan penerimaan PAD melebihi target, namun berbeda ketika masa pandemi *Covid-19* Kabupaten Sarolangun tidak dapat mencapai target pendapatan yang telah ditentukan sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan daerah yang dapat direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pandemi sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Analisis Rasio Efisiensi PAD

Dalam tabel dibawah ini dapat dilihat hasil rasio efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dilakukan:

Tabel 10. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sarolangun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio	Kriteria
2017	636,41	85,19	7,47	Tidak Efisien
2018	687,66	118,83	5,79	Tidak Efisien
2019	775,80	94,62	8,20	Tidak Efisien
2020	695,51	70,10	9,92	Tidak Efisien
2021	697,33	63,59	10,97	Tidak Efisien
2022	698,13	59,28	11,78	Tidak Efisien
Rata-rata	698,47	81,94	9,02	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun berdasarkan rasio rasio efisiensi PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan selama enam tahun (2017-2022) rata-rata berada pada angka rasio 9,02 yang berarti kinerja keuangan masih berada pada kategori tidak efisien. Mahmudi, (2019) mengatakan bahwa semakin kecil nilai rasio maka semakin efisien pemungutan yang dilakukan dan sebaliknya semakin besar nilai rasio maka berarti pemungutan yang dilakukan semakin tidak efisien. Kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun sebenarnya menunjukkan persentase yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kemampuan memungut PAD masih tidak efisien dan tidak kunjung membaik namun cenderung akan menurun. Hal ini dikarenakan penerimaan diterima tidak sebanding dengan biaya yang dibelanjakan, sehingga kinerja pemungutan ini menjadi buruk karena biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan PAD masih terlalu tinggi dibandingkan atas realisasi yang dapat direalisasikan.

Statistik Deskriptif

Tabel berikut menampilkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap rasio keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun:

Tabel 11. Statistik Deskriptif Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Desentralisasi Fiskal (Sebelum)	3	7.00	10.00	8.0000	1.73205
Desentralisasi Fiskal (Selama)	3	5.00	6.00	5.6667	.57735
Kemandirian Keuangan Daerah (Sebelum)	3	8.00	11.00	9.0000	1.73205
Kemandirian Keuangan Daerah (Selama)	3	5.00	7.00	6.0000	1.00000
Efektivitas PAD (Sebelum)	3	78.00	119.00	103.3333	22.14347
Efektivitas PAD (Selama)	3	60.00	73.00	65.6667	6.65833
Efisiensi PAD (Sebelum)	3	579.00	820.00	715.3333	123.58128
Efisiensi PAD (Selama)	3	992.00	1178.00	1089.0000	93.25771
Valid N (listwise)	3				

Sumber: SPSS, data diolah

Berlandaskan tabel 5.5 menunjukkan bahwa *Covid-19* mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dampak tersebut terlihat jelas dalam tabel di atas, dari empat analisis rasio yang dilakukan semuanya mengalami penurunan.

Uji Normalitas

Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan:

Tabel 12. Uji Normalitas Shapiro-Wilk

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Desentralisasi Fiskal	.866	6	.210
Kemandirian Keuangan Daerah	.945	6	.700
Efektivitas PAD	.850	6	.157
Efisiensi PAD	.966	6	.863

Sumber: SPSS, data diolah

Hasil yang ditunjukkan dalam tabel 5.6 menunjukkan bahwa distribusi data untuk setiap variabel adalah normal karena memiliki taraf signifikansinya $>0,05$. Data berdistribusi normal karena variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai signifikansi $0,210 > 0,05$. Variabel kemandirian keuangan daerah berdistribusi normal karena mempunyai nilai $0,700 > 0,05$. Data dikatakan berdistribusi normal karena variabel efektivitas PAD menghasilkan nilai sebesar $0,157 > 0,05$. Variabel efisiensi PAD memperlihatkan nilai signifikansi $0,863 > 0,05$ yang artinya data berdistribusi secara normal. Keseluruhan variabel memiliki penyebaran data yang normal. Hasil ini telah memenuhi syarat untuk melakukan uji perbandingan (komparatif) menggunakan uji *Paired Sample T-Test*. Ghozali (2018) mengasumsikan bahwa uji statistic T untuk sampel kecil dikatakan valid apabila nilai residual mengikuti distribusi normal.

Uji Beda Desentralisasi Fiskal

Tabel 13. Uji Beda Paired Sample T-Test Desentralisasi Fiskal

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		95% Confidence Interval of the Difference					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Selama	2.33333	1.52753	.88192	-1.46125	6.12792	2.646	2	.118

Sumber: SPSS, data diolah

Pengujian menggunakan program SPSS menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,118 yang menginterpretasikan kinerja keuangan berlandaskan rasio desentralisasi fiskal pada saat sebelum dan saat munculnya pandemi Covid-19 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,118, seperti terlihat pada tabel 5.7. Nilai ini mengartikan bahwa H1 ditolak karena hasil pengujian mendapatkan hasil nilai $0,118 > 0,05$, maka dapat dikatakan performa keuangan tidak berbeda sebelum dan saat masa epidemi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Kusmila et al., (2018) bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Barat pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah dalam hal desentralisasi fiskal. Namun temuan studi ini tidak sama dengan temuan Ishak (2021) yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 telah dan akan terus berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah, khususnya pendapatan asli daerah.

Uji Beda Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 14. Uji Beda Paired Sample T-Test Kemandirian Keuangan Daerah

		Paired Samples Test								
		Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
Pair					Lower	Upper				
1	Sebelum - Selama	3.00000	2.00000	1.15470	-1.96828	7.96828	2.598	2	.122	

Sumber: SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel 5.8, hasil pengujian pada program SPSS menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,122. Hasil ini menandakan secara signifikan tidak ada perbedaan kinerja berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah baik sebelum maupun selama pandemi berlangsung karena angka signifikansi lebih besar dari 0,05, oleh sebab itu hipotesis H2 tidak terbukti.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Kusmila et al., (2018) dan Agnika et al., (2021) bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah. Namun temuan penelitian ini berbeda dengan riset Ishak, (2021) yang menunjukkan bahwa dampak *Covid-19* telah dan akan terus mempengaruhi secara signifikan pada kemampuan keuangan daerah terutama pada pendapatan asli daerah.

Uji Beda Efektivitas PAD

Tabel 15. Uji Beda Paired Sample T-Test Efektivitas PAD

		Paired Samples Test								
		Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
Pair					Lower	Upper				
1	Sebelum - Selama	37.66667	22.59056	13.04267	-18.45139	93.78472	2.888	2	.102	

Sumber: SPSS, data diolah

Kinerja keuangan berdasarkan rasio desentralisasi fiskal sebelum dan saat pandemi Covid-19 berlangsung memiliki tingkat signifikansi 0,102, seperti terlihat pada tabel 5.9 analisis uji t sampel berpasangan program SPSS. Nilai signifikansi 0,102 > 0,05 menginformasikan bahwa

tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan jika dilihat berdasarkan rasio efektivitas PAD. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 tidak valid..

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Kusmila et al. (2018) dan Agnika et al. (2021) rasio efektivitas PAD tidak memiliki dampak yang relevan pada performa keuangan daerah. Namun temuan studi ini tidak sama dengan temuan Ishak (2021), yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 telah dan akan terus berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah, khususnya pendapatan asli daerah.

Uji Beda Efisiensi PAD

Tabel 16. Uji Beda Paired Sample T-Test Efisiensi PAD

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Selama	- 137.17264	79.19666		-	-	-	2	.042
		373.66667			714.42240	32.91094	4.718		

Sumber: SPSS, data diolah

Dilihat dari tabel 5.10, hasil uji pada program SPSS menunjukkan bahwa efisiensi PAD sebelum dan selama pandemi virus Corona memiliki nilai sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan hipotesis H4 diterima karena nilai signifikan berada pada angka $0.042 < 0.05$, sehingga kinerja keuangan berdasarkan efisiensi PAD dapat dikatakan terdapat perbedaan secara signifikan pada saat sebelum dan selama pandemi berlangsung.

Temuan studi ini sependapat dengan studi Ishak (2021) yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 telah dan akan terus berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Namun, temuan penelitian ini berbeda atas penelitian Kusmila et al. (2018) dan Agnika et al. (2021) yang menunjukkan tidak ada perbedaan efisiensi kinerja PAD.

Uji Beda Kinerja Keuangan

Tabel 17. Uji Beda Paired Sample T-Test Kinerja Keuangan Daerah

Paired Samples Test									
Paired Differences									
Pair		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
1	Sebelum - Selama	- 82.66667	185.82511	53.64309	- 200.73431	35.40097	- 1.541	11	.152

Sumber: SPSS, data diolah

Analisis uji t sampel berpasangan program SPSS mengungkapkan bahwa empat rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi *Covid-19* memiliki tingkat signifikansi 0,152, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.11. Nilai signifikansi $0,152 > 0,05$, hal ini menandakan tidak adanya perbedaan secara signifikan kemampuan keuangan Kabupaten Sarolangun sebelum dan ketika muncul *Covid-19*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H6 tidak terbukti..

Temuan studi ini tidak sama atas hasil eksplorasi yang dikerjakan oleh Ishak (2021) yang memperlihatkan adanya perbedaan besar dalam pelaksanaan keuangan daerah saat di umumukannya adanya kasus *Covid-19*.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian serta analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan yang masih kurang pada pelaksanaan desentralisasi Kabupaten Sarolangun. Uji hipotesis menunjukkan hasil kinerja keuangan tidak memiliki perbedaan pada saat sebelum maupaun saat pandemi berlangsung secara signifikan.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sifat hubungan deengan pola instruktif dan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan yang sangat rendah di Kabupaten Sarolangun. Berlandaskan rasio kemandirian keuangan daerah, uji hipotesis menunjukkan performa keuangan daerah Kabupaten Sarolangun tidak ditemukan perbedaan signifikan baik pada saat sebelum maupun saat selama Covid-19 muncul.
3. Rasio efektivitas PAD memperlihatkan bahwa kemampuan menghasilkan pendapatan PAD di Kabupaten Sarolangun masih kurang berhasil. Berdasarkan rasio efektivitas

PAD, uji hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan kemampuan sektor keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 tidak berbeda.

4. Rasio efisiensi PAD menunjukkan bahwa kemampuan menghimpun PAD di Kabupaten Sarolangun masih belum efektif. Berdasarkan rasio efisiensi PAD, uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebelum dan selama berlangsungnya pandemi Covid-19.
5. Sebelum dan pada saat adanya Covid-19 secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kabupaten Sarolangun tidak jauh berbeda.

KETERBASAN DAN SARAN

Keterbasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang masih belum luas, rasio yang digunakan hanya memuat empat rasio keuangan, alat analisis yang masih sederhana, serta model penelitian yang tidak terlalu beragam.
2. Waktu penelitian yang hanya di terpusat pada masa sebelum dan selama pandemi saja, serta penelitian yang melihat perbandingannya saja.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dipaparkan, saran yang bisa ditunjukkan bagi peneliti berikutnya dan pemerintah daerah adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, rasio keuangan, alat analisis, dan model penelitian supaya memperluas hasil penelitian mengenai topik keuangan daerah khususnya pada kinerja.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan sumber potensi daerah dan mengelola dengan baik sumber pendapatan sehingga tercapai tujuan dari pembentukan otonomi daerah yang terpusat, mandiri, efektif, dan efisien khususnya dalam bidang keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, M., Putra, S. S., & Sudrajat. 2021. Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493–503.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. IPB PRESS.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Kesembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ishak, J. F. 2021. Covid-19 : Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587–591.
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Jambi Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah. 27–39.
- Mahmudi. 2019. *Analaisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.
- Manueke, B. B. R. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2019. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(2), 132–146.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2020. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. PUSTAKABARUPRESS.
- Wibisono, D. 2000. *Seri Komunikasi Profesional Riset Bisnis* (Pertama). BPFE-YOGYAKARTA.
- Widyaningsih, D. 2021. *Statistika Bisnis*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yusuf, M. 2019. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.